

Judul : Tunjangan perumahan DPR sampai oktober
Tanggal : Rabu, 27 Agustus 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1 dan 15

LEMBAGA LEGISLATIF

Tunjangan Perumahan DPR sampai Oktober

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Selasa (26/8/2025), mengatakan, tunjangan perumahan untuk anggota DPR yang besarnya Rp 50 juta per bulan hanya diberikan satu tahun, yaitu dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Tunjangan itu tidak diberikan selama satu periode keanggotaan selama lima tahun. Dengan demikian, total tunjangan perumahan yang diterima setiap anggota DPR sebesar Rp 600 juta.

Pernyataan itu diberikan satu hari setelah adanya unjuk rasa menolak tunjangan perumahan anggota DPR di sekitar Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/8).

"(Tunjangan perumahan) Diberikan setiap bulan, dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Itu per bulan Rp 50 juta yang nantinya dipakai kontrak untuk selama lima tahun, periode 2024-2029," ucap Dasco.

Hingga September 2024, anggota DPR menempati rumah dinas anggota DPR di Jakarta. Rumah dinas itu ada di kawasan Kalibata (596 unit) dan di Ulujami (51 unit).

Namun, setelah adanya Surat Edaran Setjen DPR pada 25 September 2024, anggota DPR 2024-2029 mendapatkan tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas rumah jabatan anggota. Salah satu alasan surat itu terbit karena rumah dinas dinilai sudah tidak layak (*Kompas*, 7/10/2024).

Kini, deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata masih berdiri kokoh dan layak huni. Meski demikian, sebagian besar deretan rumah dinas itu tak berpenghuni.

(Bersambung ke him 15 kol 1-4)

Tunjangan Perumahan DPR sampai Oktober

(Sambungan dari halaman 1)

Karena tak dihuni, banyak dari rumah dinas berlantai dua itu tampak tak terawat. Rumput tumbuh liar hingga menyentuh jendela rumah, sementara daun-daun kering berserakan di halaman. Cat krem pada dinding berpadu dengan atap berwarna merah kecoklatan yang tampak kusam dan memudar.

Anggaran terbatas

Dasco menyampaikan, informasi yang disiarkan kepada publik selama ini tak lengkap sehingga diasumsikan setiap anggota DPR bakal menerima tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan sejak awal menjabat pada Oktober 2024 hingga akhir masa jabatan September 2029. Informasi ini lantas di-handlingkan dengan kondisi ekonomi yang sulit sehingga memantik unjuk rasa.

Adapun terkait pemberian tunjangan perumahan yang diberikan secara diangsur selama setahun ini, menurut Dasco, karena anggaran negara terbatas.

"Karena anggarannya tidak cukup diberikan sekaligus sehingga diangsur selama seta-

hun. Jadi, nanti kalau melihat daftar tunjangan pada November 2025, itu yang Rp 50 juta (tunjangan perumahan) sudah enggak ada lagi," ucap Dasco.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar membenarkan bahwa tunjangan perumahan hanya diberikan kepada anggota dewan selama satu tahun, dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Artinya, setelah Oktober 2025, anggota dewan tidak lagi menerima tunjangan perumahan.

"Iya, betul," katanya singkat saat dihubungi.

Secara terpisah, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR yang mencapai Rp 600 juta dan diberikan selama Oktober 2024-Oktober 2025 tetap pemborosan.

Menurut Lucius, jika dibandingkan dengan biaya renovasi rumah jabatan anggota DPR, satu rumah anggota DPR belum tentu menghabiskan Rp 600 juta. "Jadi, tetap saja kemahalan tunjangan perumahan itu," ujar Lucius.

Berdasarkan data resmi DPR, biaya renovasi rumah dinas anggota dewan berkisar Rp

2.081.157 hingga Rp 2.159.391 per meter persegi, tergantung dari luas bangunan yang rata-rata berkisar 227-247 meter persegi. Jika menghitung untuk rumah seluas 230 meter persegi, biayanya sekitar Rp 483 juta.

Dibebaskan

Polda Metro Jaya kemarin memulangkan pelajar yang ditangkap saat unjuk rasa di sekitar Kompleks Parlemen pada Senin (25/8).

"Dari 351 orang yang diamankan, 155 di antaranya dewasa. Kemudian, 196 lainnya adalah anak, seseorang berusia di bawah 18 tahun," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi.

Ade Ary menyebut banyak pelajar ikut aksi karena ajakan di media sosial. Mereka datang dari berbagai wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Sementara itu, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Dimas Bagus Arya mengatakan, pihaknya yang tergabung dalam koalisi Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengupayakan pendampingan kepada peserta unjuk rasa yang masih

ditahan.

Selain dipicu besarnya tunjangan perumahan anggota DPR, unjuk rasa pada Senin juga disulut pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni saat kunjungan kerja di Polda Sumatera Utara, Jumat (22/8). Saat itu, ia merespons seruan pembubaran DPR di media sosial dengan menyebut pandangan itu sebagai mental "orang tolol sedunia".

Sahroni mengatakan, pernyataan "orang tolol sedunia" itu sesungguhnya bukan ditujukan kepada publik. Namun, pada cara berpikir pihak yang menilai DPR bisa dibubarkan karena isu gaji dan tunjangan anggotanya.

"Kan, gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol, kan, enggak ada," ujar Sahroni saat dihubungi Kompas.com.

Secara terpisah, mantan anggota DPR dari Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, menilai ucapan tersebut menghina rakyat. "Ini bukan sekadar ucapan sembrono, ini penghinaan terhadap harkat demokrasi itu sendiri," ujar Didi.

(BOW/RTG/NAD/DYT)